

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTAENG

Indrayani Tawang¹, Muhammadiah², Nuryanti Mustari³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Makassar
e-mail: indrayanit@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze collaborative governance in dealing with the waste of the sugar factory industry in Makassar City, using the type of descriptive qualitative research. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the government, the community, and the private sector had not done collaborative governance maximally in preventing the occurrence of environmental pollution caused by the waste of the sugar factory industry. The way of processing sugar factory industrial waste still has the potential to cause several problems. There has been no cooperation between the government, the community, and the private sector in the treatment of waste. The resulting waste is detrimental to the community members, while the compensation received by the community is not in accordance with what is felt by the community around the factory Sugar Factory PT. Makassar Tene.

Keywords: *Collaborative governance, handling industrial waste*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis *collaborative governance* dalam mengatasi limbah industri pabrik gula di Kota Makassar, menggunakan jenis penelitian kualitatif bertipe deskriptif. Teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah, masyarakat, dan swasta belum melakukan *collaborative governance* secara maksimal dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri pabrik gula. Cara pengolahan limbah industri pabrik gula masih berpotensi menimbulkan beberapa masalah. Belum ada kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengolahan limbah tersebut. Limbah yang dihasilkan merugikan warga masyarakat, sedangkan kompensasi yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan yang dirasakan masyarakat sekitar pabrik. Pabrik Gula PT. Makassar Tene.

Kata kunci: *Collaborative governance, penanganan limbah industri*

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan kota yang cukup pesat menuntut adanya penyediaan sarana dan prasarana kota yang semakin baik dan memadai. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dasar yang berhubungan dengan upaya pembangunan perkotaan. Konsekuensi dari pertumbuhan masyarakat urban berdampak dalam penyediaan prasarana perkotaan khususnya dalam pengelolaan air limbah.

Jika sistem pengelolaan air limbah yang buruk ataupun pelaksanaan sistem yang salah dapat menimbulkan kerugian-kerugian yang

disebabkan oleh air limbah tersebut. Masalah-masalah yang dapat ditimbulkan oleh air limbah, antara lain menimbulkan bahaya kontaminasi dan pencemaran pada air permukaan dan badan air lainnya yang berpotensi nantinya badan air tersebut menjadi wadah bagi penularan penyakit.

Mengingat dalam usaha penanganan limbah industri ini banyak melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*), maka konsep *collaborative governance* menjadi penting untuk dipertimbangkan. *Collaborative governance* dipandang sebagai suatu usaha dan respon pemerintah dalam kegiatan penanganan masalah publik, manajemen pemerintahan dan

pelaksanaan program pemerintahan lainnya dimana pemerintah perlu melakukan kerja sama/ kemitraan dalam arti yang lebih luas dengan masyarakat, dan pihak swasta mengingat program/ kegiatan dan masalah yang dihadapi cukup kompleks. Selain itu juga mengingat era demokrasi sekarang ini yang mana menuntut adanya keterlibatan pihak swasta juga dalam kegiatan pemerintahan.

Adanya sebuah tanggung jawab yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk pemenuhan pertanggungjawaban dan di penuhinya sebuah tanggung jawab maka pihak perusahaan seharusnya telah melakukan kegiatan pembangunan dengan sistem berkelanjutan tidak merugikan masyarakat kini dan masyarakat yang akan datang, perusahaan di perbolehkan mendapatkan keuntungan namun tidak mengabaikan dan melupakan hak yang dimiliki masyarakat dan investor itu sendiri (Triraharjo, 2017: 15).

Sejalan dengan permasalahan yang terjadi pada sekitar PG (pabrik gula) PT. Makassar Tene diketahui bahwa pengelolaan dari limbah pabrik tersebut dirasa kurang mendapatkan penanganan yang tepat. Limbah cair masih membayangi warga sekitar pabrik seperti contohnya sungai-sungai di sekitar pabrik semakin berwarna hitam pekat dan menimbulkan bau yang sangat menyengat yang berakibat masyarakat yang untuk mencegah dan mengatasi limbah industri, pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang-undangan ataupun dengan cara yang lain.

Pada dasarnya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, pemerintah harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Ketika semua program telah dibuat dan telah diterapkan, tetapi masih terlihat banyak terjadi pencemaran dimana-mana, hal ini bisa dari pihak pemerintah yang kurang tanggap meskipun program telah dibuat tanpa harus ada pengawasan lebih lanjut terhadap penerapan program yang ada sehingga program tersebut tidak bisa berjalan dengan maksimal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Collaborative Governance

Menurut Junaidi (2015: 38), *collaborative governance* dipandang sebagai sebuah respon dari organisasi/ instansi terhadap perubahan-perubahan lingkungan eksternal yang ada, misal

isu-isu publik yang semakin meluas dan keluar dari batas-batas normal, jumlah aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan keputusan juga semakin banyak, kapasitas pemerintah daerah, kota dan pemerintah pusat terbatas, sedangkan institusi-institusi di luar pemerintah jumlahnya meningkat serta inisiatif spontan masyarakat semakin meluas dan kritis.

Kolaborasi dalam pengertian normatif merupakan aspirasi atau tujuan-tujuan filosofis bagi pemerintah untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan para partner atau mitranya. Mengingat *collaborative governance* bisa merupakan bukan institusi formal, tetapi juga bisa merupakan a way of behaving (cara berperilaku/ bersikap) institusi non pemerintah yang lebih besar dalam melibatkan ke dalam manajemen publik pada suatu periode (Ansell and Gash dalam Sudarmo, 2011: 101), dengan: (1) Melakukan kerja sama/ kemitraan dalam arti yang lebih luas dengan masyarakat, instansi swasta lainnya karena mengingat program/ kegiatan dan masalah yang dihadapi cukup kompleks. Selain itu juga mengingat era demokrasi sekarang ini yang mana menuntut adanya keterlibatan pihak swasta juga dalam kegiatan pemerintahan; (2) Alasan kolaborasi secara umum muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan sebagai berikut: kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi, konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam, upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik (Ansell and Gash dalam Sudarmo, 2009: 124).

Konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam seringkali merugikan berbagai pihak dan memerlukan tenaga dan perhatian yang sangat besar. Sehingga tanpa melakukan *collaborative governance* dalam pemecahan masalah, konflik antar kelompok sulit untuk diatasi. Ketika berbagai upaya telah dilakukan dan belum membuahkan hasil, maka kolaborasi bisa dilakukan sebagai upaya pemecahan masalah yang memiliki legitimasi kuat karena melibatkan berbagai kelompok kepentingan untuk secara aktif berpartisipasi dan mengambil keputusan secara bersama-sama untuk bisa disetujui secara bersama-sama (Sudarmo, 2009: 124).

Kolaborasi membentuk suatu pendekatan holistik/ menyeluruh yang membutuhkan

integrasi antara pemerintah dan partisipasi masyarakat, sehingga disini institusi dituntut mempunyai sistem yang semakin tinggi tingkat transparansi, akuntabilitas dan legitimasinya.

Model *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007: 24-27), terdiri dari 4 (empat) variabel utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif. Tahapan pada proses kolaboratif meliputi dialog *face-to-face*, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, memahami bersama dan hasil sementara. Semua *collaborative governance* dibangun atas dialog *face-to-face* antar para *stakeholders*. Sebagai suatu proses konsensus, dialog langsung diperlukan para *stakeholders* untuk mengidentifikasi peluang untuk keuntungan bersama.

Anwar (2009: 4), menjelaskan bahwa *good environmental governance* adalah organisasi pemerintahan yang mengelola lingkungan dengan baik. Disini faktor internal yang digunakan untuk menghitung dan menilai modal, keuntungan, perencanaan, pelaksanaan dan kinerja ekonomi dengan baik. *Good environmental governance* mencakup organisasi pemerintahan yang mengelola lingkungan secara baik dan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Konsep Penanganan Limbah Industri

Salah satu pencemaran yang sering terjadi ialah pencemaran pada air sungai, yang mana pencemaran air dari sumber buangan limbah industri ini menyebabkan sumberdaya air sungai tidak berfungsi lagi untuk irigasi karena kualitas air yang sudah menurun, sudah kotor, seera menimbulkan bau tidak enak baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya (Kormarawijaya, 2016).

Surat Keputusan Nomor 32 Tahun 2014 pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa, Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Pada Badan Lingkungan Hidup tidak boleh menempati Limbah di sungai.

Ketentuan Pelanggaran Terhadap Lingkungan Yang Di Sebabkan Oleh Limbah Pabrik Pasal 25 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 Ketentuan tersebut adalah: (a) Membuang limbah cair, limbah padat yang

belum diolah ke dalam media lingkungan, (b) Menimbulkan kebisingan, bau-bauan, asap, dan debu, (c) Menghalangi petugas pada saat dilakukan pemeriksaan, (d) Menyembunyikan kebenaran informasi berkaitan dengan dugaan pencemaran lingkungan, dan (e) Menggunakan izin selain dari yang ditentukan dalam izin.

Tindakan yang merusak dan mencemari lingkungan yang terjadi ini jelas menyalahi aturan atau telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah. Selain melanggar hukum tentu dampak limbah pabrik atau limbah industri ini sangat merugikan masyarakat, Seharusnya masalah seperti ini segera di selesaikan dengan cepat sehingga terjadi berlarut-larut dan lama sehingga kerugian masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi pencemaran limbah industri yang seharusnya dapat dilakukan secara maksimal hingga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat berperan aktif baik melalui perundang-undangan ataupun dengan cara yang lain. Pemerintah harus menggiatkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dengan mengutamakan pembangunan yang berwawasan ke depan serta tidak merugikan pihak lain dengan maksud agar nantinya dapat dimanfaatkan kembali oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang (Sutrisno, 2011).

3. METODE PENELITIAN

Waktu penelitian berlangsung selama 2 (dua) bulan yang diawali dengan peninjauan ke lokasi penelitian hingga penyusunan hasil penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Jalan Ir. Sutami Tol, Kelurahan Parangloe Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, agar dapat mengungkap dan memahami tentang *collaborative governance* antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, PT. Makassar Tene, dan masyarakat secara mendalam. Adapun tipe penelitian ini bersifat deskriptif, dengan mendeskripsikan dan mengkaji data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*),

observasi, dan dokumentasi terkait *collaborative governance*.

Informan yang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti, adalah Pimpinan PT. Makassar Tene, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Kepala Seksi Lingkungan Hidup Kota Makassar, Kepala Kasubbid Perencanaan Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar, dan Ketua RT/ RW dan masyarakat sekitar.

Data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya, berupa dokumen laporan-laporan tertulis dan peraturan-peraturan lainnya. Sumber data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan dari informan melalui wawancara mendalam mengenai *collaborative governance* antar organisasi khususnya dalam hal ini yakni antara Dinas Lingkungan Hidup Kota, PT. Makassar Tene, dan masyarakat.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, dengan melakukan *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerja Sama/ Kemitraan Masyarakat dan Pemerintah

Kerja sama atau kemitraan dengan masyarakat dan pemerintah merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan kesepakatan atau pesan dari masyarakat ke orang lain. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa kerja sama dan kemitraan penting dilakukan untuk menjalin interaksi sosial. Selain itu kesatuan bisa dilakukan dimanapun tanpa adanya jadwal yang ditentukan sehingga tidak memerlukan adanya pengertian aturan limbah yang harus disepakati sebelumnya dan tidak ada batasan-batasan baik itu pangkat dan jabatan antara pimpinan PT. Makassar Tene dengan masyarakat sekitar.

Juga terungkap bahwa setiap stakeholder yang berperan dalam menangani masalah ini harus memiliki solusi masing-masing agar titik temu dari masalah ini bisa teratasi, karena semata-mata kemitraan dengan masyarakat bukan hanya tugas mengatasi limbah namun seluruh instansi yang berpengaruh harus turun tangan juga dalam bersama-sama

menyelesaikan masalah ini, agar tercipta lingkungan hidup yang sesuai dengan harapan.

Saling Ketergantungan Antar Institusi Pemerintah

Saling ketergantungan antar institusi yang terkait merupakan hal yang penting juga dalam menangani permasalahan dalam mengatasi limbah industri pabrik gula. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa pemantapan konfirmasi setiap tingkatan pada setiap instansi yang terkait sangat diperlukan yang bisa dimulai dari instansi terkecil seperti kelurahan dan RT/RW sampai instansi yang inti, dimulai dari instansi terkecil yang sangat paham betul problematika yang sering terjadi di masyarakat.

Keterlibatan atau kerja sama adalah langkah awal dari terciptanya masyarakat yang berdaya untuk bisa berkembang secara mandiri, sehingga hal ini perlu diselenggarakan secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk kelangsungan lingkungan hidup. Mengenai kompleksitas perencanaan mengatasi limbah, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, akan tetapi bagaimana masyarakat juga dapat berpikir dalam rangka proses kerja sama untuk mengatasi limbah dan ikut bertanggung jawab di dalamnya sehingga kegiatan itu bisa terlaksana dengan lancar.

Pemerintah senantiasa mengikutsertakan masyarakat dan swasta untuk ikut terlibat langsung dalam suatu kegiatan. Keterlibatan seseorang terkait hubungan kompleksitas dan saling ketergantungan antara institusi telah memberikan sumbangsih kepada pimpinan PT. Makassar Tene dalam mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya. Ini menjadi salah satu tolak ukur berhasilnya pemerintah di badan lingkungan hidup.

PT. Makassar Tene harus melakukan upaya-upaya untuk menyebarluaskan informasi dan melakukan sosialisasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh pimpinan PT. Makassar Tene, sehingga masyarakat dan RT/RW bisa mengetahui dan terlibat atau ikut dalam pertemuan. Persoalannya adalah bahwa Pimpinan PT. Makassar Tene hanya menyampaikan kepada orang-orang tertentu saja. Pertemuan masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan tidak terlibat atau tidak memberikan sumbangsih berupa tenaga, waktu, maupun pikiran, karena yang dipanggil

serta dilibatkan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan PT. Makassar Tene itu hanya kaum kerabat dan yang mempunyai kedekatan serta orang-orang yang berpengaruh di Kelurahan Parangloe untuk melakukan program CSR atau melakukan kerja sama dalam mengatasi limbah Industri pabrik gula PT. Makassar Tene.

Pendekatan Holistik/ Menyeluruh yang Membutuhkan Integrasi antara Pemerintah dan Masyarakat

Dalam menganalisa fakta di lapangan di butuhkan beberapa pendekatan holistik yang membutuhkan integrasi antara pemerintah dan masyarakat agar informasi di lapangan tentang limbah industri cepat teratasi dan menemukan solusi.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa mengadakannya pendekatan holistik/ menyeluruh membutuhkan integrasi antara pemerintah dan partisipasi masyarakat mampu memudahkan permasalahan yang terjadi di lapangan karena masing-masing tiap pemerintah dan RT/RW sudah dibekali dengan kemampuan sesuai dengan bidangnya. Misalkan saja ada yang bertugas melakukan pengecekan maupun pendataan dan adapula yang bertugas merumuskan suatu kebijakan untuk menemukan solusi. Informan juga menambahkan bahwa permasalahan limbah industri pabrik gula sangatlah bersinggungan dengan suasana limbah industri dimana penyebab di Sungai Bontoa Selatan di Kelurahan Parangloe salah satu penyebab limbah pabrik gula menjadi sangat hitam dan bau.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti selama di lapangan yang ikut terjun langsung pada RT/RW, bahwa memang ada beberapa kerjasama dari instansi yang berbeda antara pihak pemerintah dan swasta untuk melakukan pengelolaan limbah industri pabrik gula atau pendataan seperti contohnya: dari pabrik gula terkait limbah yang bekerja sama dengan pemerintah yang berinteraksi langsung di lapangan untuk mensurvey jumlah kadar limbahnya yang ada di kota Makassar dengan cara proses pendataan, setelah itu dilakukan pembinaan.

Konflik Antarkelompok

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa pimpinan PT. Makassar Tene berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat dengan tidak membeda-bedakan masyarakat. Dan, Pimpinan PT. Makassar Tene berusaha memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

Namun, collaborative governance harus dilakukan oleh pihak PT. Makassar Tene dan pemerintah. Hal ini dapat dilihat bahwa masih belum terselesaikannya hasil program perencanaan untuk mengatasi limbah di Kelurahan Parangloe yang terus menimbulkan pencemaran sungai. Kondisi ini tentu dapat memicu konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Sehingga, diperlukan sinergi untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi ini untuk dapat menghindari terjadinya konflik.

Sinergi merupakan bentuk kerjasama yang dihasilkan melalui kolaborasi dari masing-masing pihak untuk menyatukan satu tujuan. Bersinergi berarti saling menghargai perbedaan pendapat dan bersedia saling berbagi. tidak mementingkan diri sendiri, namun berpikir menang-menang dan tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan dan bertujuan memadukan bagian-bagian terpisah. Permasalahan limbah industri di sungai sangat membutuhkan sinergi dari masing-masing instansi yang memiliki tanggung jawab.

Melibatkan Berbagai Kelompok Kepentingan untuk mengatasi limbah

Salah satu bentuk untuk melibatkan berbagai kelompok kepentingan untuk secara aktif berpartisipasi dan mengambil keputusan pada setiap instansi maupun swasta ialah melakukan tindakan pengecekan setiap mengambil keputusan. Usaha pemerintah untuk memperbaiki sungai yang ada di Kelurahan Parangloe yang sangat tercemar adalah pemerintahan harus menunjukkan sikap progresif dengan nilai-nilai perjuangan yang mementingkan kepentingan Negara dan bermasyarakat melibatkan berbagai kelompok kepentingan untuk secara aktif berpartisipasi dan mengambil keputusan.

Pembinaan saat ini rutin diadakan dan biasanya yang terdaftar sebagai tim audit adalah

mereka yang sudah lama berprofesi sebagai tim pengecekan limbah industri pabrik gula disatu tempat dan tidak berpindah-pindah tempat. Mereka diberikan ultimatum dari aparat untuk mengelola air limbah agar bersih supaya masyarakat nyaman dan aman.

Face to Face of Relation

Pertemuan secara tatap muka (*face to face of relation*) atau membangun kepercayaan dan komitmen merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan informasi atau pesan dari seorang ke orang lain. Sejalan dengan perkembangan organisasi, perusahaan maupun lembaga pemerintah, kesepakatan dalam kesatuan terutama perkembangan dalam mengiringi dalam membangun kepercayaan atau komitmen untuk mengatasi limbah yang efektif.

Dalam interaksi sehari-hari untuk bertatap muka antara masyarakat dan swasta atau pemerintahan merupakan suatu hal yang harus dilakukan karena tanpa adanya *face-to-face* dalam membangun kepercayaan hubungan antara sesama manusia maupun masyarakat biasa atau tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam penelitian terungkap bahwa pertemuan secara tatap muka dan kesatuan yang dibangun oleh Pimpinan PT. Makassar Tene, masyarakat, dan pemerintah sudah baik namun masih ada yang perlu di tingkatkan yaitu dari segi pengawasan di lapangan tentang bagaimana pelaksanaan yang terjadi di lapangan adalah sesuai yang di harapkan.

Membangun kepercayaan

Membangun kepercayaan adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat, pemerintah dan swasta dalam melaksanakan suatu kegiatan yang dapat bermanfaat baik secara individu maupun dalam organisasi sangat penting karena secara potensial dapat meningkatkan kualitas kerja, kinerja pada pegawai dan meningkatkan produktivitas, serta organisasi itu bisa maju berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah tidak sama atau berbeda dengan apa yang disampaikan masyarakat terkait dalam membangun kepercayaan yang berupa keikutsertaan dalam suatu kegiatan.

Komitmen pada setiap karyawan sangat penting karena dengan suatu komitmen seorang karyawan dapat menjadi lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dibanding dengan karyawan yang tidak mempunyai komitmen. Biasanya karyawan yang memiliki suatu komitmen, akan bekerja secara optimal sehingga dapat mencurahkan perhatian, pikiran, tenaga dan waktunya untuk pekerjaannya, sehingga apa yang sudah dikerjakannya sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa cara pengolahan limbah industri pabrik gula masih berpotensi menimbulkan beberapa masalah. Belum ada kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengolahan limbah tersebut. Limbah yang dihasilkan merugikan warga masyarakat, sedangkan kompensasi yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan yang dirasakan masyarakat sekitar pabrik. Pabrik Gula PT. Makassar Tene.

6. REFERENSI

- Anshell and Gash. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Pratic*, Barkley: University of California. Hlm.557-561
- Adisasmita (2011) *Kemitraan Dengan Kolaborasi Erlangga.*, Jatinangor.
- Junaidi. 2015. *Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Limba Industri di Kota Tanjung Pinang.*
- Kormarawijaya, W. (2016). *Sebaran limbah cair industridan dampaknya di beberapa desa Kecamatan Racaengkek Kabupaten Bandung.*
- Sudarmo (2011) *pengertian Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Limba PT.* Bumi Aksara., Jakarta
- Sutrisno. (2011). *Politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Universitas Nahdatul Ulama atau IAIN Surakarta Jawa Tengah.* 45.
- UU nomor 4 tahun 1982 pasal 8 menyebutkan bahwa "Pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan mendorong ditingkatnya upaya pelestarian

kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Surat Keputusan Nomor 32 Tahun 2014 pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa, Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Pada Badan Lingkungan Hidup tidak boleh menempati Limbah di sungai.

Ketentuan Pelanggaran Terhadap Lingkungan Yang Di Sebabkan Oleh Limbah Pabrik Pasal 25 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005